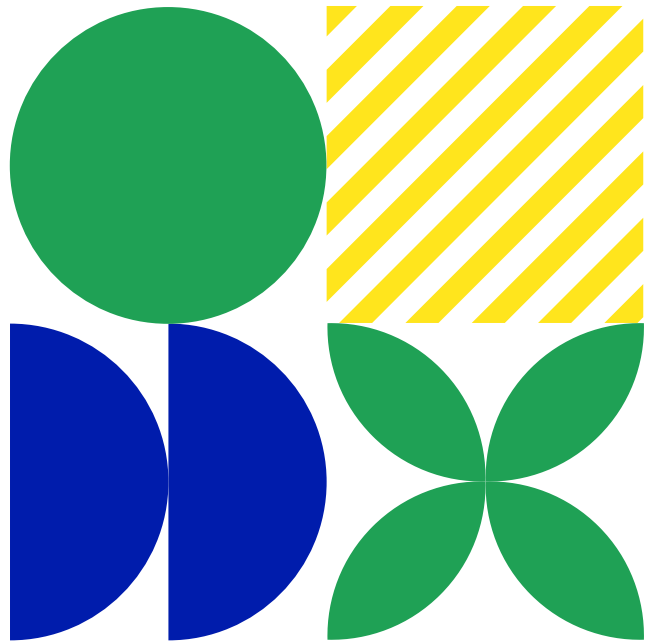




# **RENCANA KERJA TAHUN 2026**

**DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**





## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR: 000.7.2/251/Bappeda - 9.51/2025

### TENTANG

### PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

#### GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c angka 3 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan **Rencana**

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 956);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal ... 6 oktober 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

  
ANWAR HAFID



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2026

1. Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Renja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Renja Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Renja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Renja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
12. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah;
15. Renja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah;
16. Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
17. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;
18. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;
19. Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah;
20. Renja Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
21. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;

22. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;
23. Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
24. Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah;
25. Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah;
26. Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;
27. Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
29. Renja Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah;
30. Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
31. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
32. Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
33. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
34. Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
35. Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
36. Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
37. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Tengah;
38. Renja Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah;
39. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
40. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Kami dapat menyelesaikan Rencana kerja Tahun 2026.

Dalam menyelesaikan Rencana Kerja Tahun 2026 ini kami selaku penulis tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan segala hormat pada kesempatan yang baik ini perkenankan Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam pembuatan Laporan ini.

Kami sangat menyadari karena keterbatasan waktu kiranya Rencana Kerja Tahun 2026 ini masih jauh dari sempurna.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2026 ini semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Palu, 15 September 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



**SUMARNO, SE**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670527 199403 1 013



**RENCANA KERJA TAHUN 2026**  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>4</b>
A. Latar Belakang .....	4
B. Landasan Hukum .....	6
C. Maksud dan Tujuan.....	7
D. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	37
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	37
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025.....	38
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	<b>38</b>
A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	38
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan.....	38
C. Program dan Kegiatan.....	38
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b> .....	<b>38</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>51</b>





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Ketersediaan sistem transportasi yang handal sebagai penggerak/pendorong pembangunan serta didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia yang professional, akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan berbagai sektor dalam rangka mewujudkan Sulawesi Tengah yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Rancangan pembangunan sektor transportasi dititikberatkan pada upaya meningkatkan aksesibilitas, pelayanan, keselamatan dan keamanan, yang efektif dan efisien, sehingga mobilitas manusia, barang serta jasa lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional dapat berjalan tertib, terpadu serta lancar yang akhirnya dapat mendukung pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara.

Dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang handal yang diindikasikan sebagai tersedianya jasa transportasi berkemampuan tinggi, kapasitas dan kualitas yang memadai, tepat waktu serta menjangkau seluruh wilayah/kawasan, terdapat berbagai peluang dan kendala diantaranya adalah perubahan dan ketidakpastian yang disebabkan oleh lingkungan yang dinamis seperti otonomi daerah, terjadinya globalisasi ekonomi, perubahan perilaku permintaan jasa transportasi, kondisi politik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya keterbatasan sumber daya.

Oleh karena itu, sistem transportasi perlu terus ditata dan disempurnakan dan didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga terwujud kehandalan pelayanan dan keterpaduan antar dan intra moda transportasi. Di samping itu, sistem transportasi juga perlu disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, tingkat kemajuan teknologi, kebijakan tata ruang, pelestarian lingkungan dan kebijakan energi, sehingga akan selalu dapat memenuhi kebutuhan pembangunan, tuntutan masyarakat serta kebutuhan perdagangan nasional dan internasional dengan memperhatikan kehandalan serta kelaikan sarana transportasi.





Sejalan dengan sistem transportasi yang ada, maka sistem transportasi di Sulawesi Tengah sangat perlu ditingkatkan baik dari segi sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari implementasi Visi Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

***“Terwujudnya Layanan Transportasi Yang Nyaman, Aman Dan Terjangkau”.***

Dari perwujudan tersebut maka sebagai instansi yang menjalankan program pemerintah daerah perlu adanya penyelenggaraan transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan produksi daerah Sulawesi Tengah melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi, sehingga dapat mendukung tercapainya visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu ***“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Yang Maju Dan Berkelanjutan”.***

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah) Tahun 2026 memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya yaitu; dokumen ini disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Cetak Biru Kementerian Perhubungan serta dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 terutama yang menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

Keterkaitan RKPD Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi Kebijakan Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan kebijakan pemerintah. Dokumen RKPD ini merupakan penjabaran dari RPJMD dengan memperhatikan kesinambungan dari penjabaran





program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Ats Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomorhgsffhghsgf 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan (2005 – 2025);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;





15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan (2005 – 2025);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pedoman Dan Proses Perencanaan Di Lingkungan Departemen Perhubungan;
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 754);
22. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Optimalisasi Koordinasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Kementerian Perhubungan Dengan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 180, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 166).
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tengah;

### **C. Maksud dan Tujuan**

1. Sebagai acuan untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam tahun anggaran;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2026;
3. Sebagai bahan untuk mengevaluasi keberhasilan RPJM yang telah disusun dalam rangka mewujudkan pelaksanaan visi dan misi Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah.





#### **D. Sistematika Penulisan**

Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD
- C. Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V PENUTUP**





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dengan kata lain, pengukuran kinerja didahului dengan tahapan penetapan indikator kinerja yang selanjutnya selalu dilakukan evaluasi terhadap hasil kinerja yang selama ini dilaksanakan.

Evaluasi Pelaksanaan rencana kerja tahun lalu adalah merupakan kewajiban bagi setiap OPD dalam rangka mengukur keberhasilan yang diperoleh. Di samping itu juga merupakan salah satu bentuk komitmen yang dicapai oleh OPD.





Tabel II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11				
									(5+7+9)	(10/4)				
01	1.01													
		<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	4 Dokumen, 1 Laporan & 1 Data											
01	1.01	0	0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1	2	1	100	3 Dokumen	1	
01	1.01	0	0	11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	1	1	1	100	2 Dokumen	1	
01	1.01	0	0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun	3 Laporan	2	2	2	100	3 Laporan	2	





01	1.01	0	0	08	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0	0	0	0	1 Data	0	
01	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun</b>	<b>1 Dokumen, 1 Laporan &amp; 150 Orang/Bulan</b>							
01	2	02	0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/Bulan	130 Orang/Bulan	130 Orang/Bulan	130 Orang/Bulan	100	120 Orang/Bulan	130 Orang/Bulan	
01	2	02	0	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun	1 Dokumen	1	1	1	100	1 Dokumen	1	
01	2	02	0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	0	0	0	1 Laporan	0	





01	2	03			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun</b>	<b>1 Laporan</b>						<b>1 Laporan</b>		
01	2	03	0	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1	1	1	100		1 Laporan	1	
01	2	05			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Yang Tersedia dan Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	<b>1 Paket &amp; 70 Orang</b>						<b>1 Paket &amp; 40 Orang</b>		
01	2	05	0	02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Yang Tersedia	1 Paket	0	0	0	0		1 Paket	0	
01	2	05	0	10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	0	0	0	0		40 Orang	0	





					Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
01	1	06			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Tersusun</b>	<b>5 Paket &amp; 1 Laporan</b>					<b>5 Paket &amp; 1 Laporan</b>	
01	1	06	0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	100	1 Paket	1
01	1	06	0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	100	1 Paket	1
01	1	06	0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1	1	1	100	2 Paket	1
01	1	06	0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1	1	1	100	1 Laporan	1
01	1	06	0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	100	1 Paket	1





01	1	07			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan</b>	<b>1 Paket &amp; 6 Unit</b>						<b>9 Unit &amp; 1 Paket</b>		
01	1	07	0	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	1	1	1	100	3 Unit	1		
01	1	07	0	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	100	1 Paket	1		
01	1	07	0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1	1	1	100	2 Unit	1		
01	1	07	0	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1	1	1	100	1 Unit	1		
01	1	07	0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1	1	1	100	5 Unit	1		
01	2	08			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia</b>	<b>4 Laporan</b>						<b>4 Laporan</b>		
01	2	08	0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1	1	1	100	1 Laporan	1		





01	2	08	0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1	1	1	100	1 Laporan	1	
01	2	08	0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1	1	1	100	1 Laporan	1	
01	2	08	0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1	1	1	100	1 Laporan	1	
<b>01</b>	<b>2</b>	<b>09</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara</b>	<b>83 Unit</b>					<b>54 Unit</b>		
01	2	09	0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	1	1	1	100	45 Unit	1	
01	2	09	0	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	1 Unit	1	1	1	100	1 Unit	1	





01	2	09	0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1	1	1	100	1 Unit	1	
01	2	09	0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	0	0	0	0	7 Unit	0	
2	15	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Konektivitas Darat, Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal</b>						<b>5 Dokumen, 122 Laporan, &amp; 21.723 Unit</b>		
2	15	02	1.10		<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>	<b>Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>3 Dokumen</b>	<b>1</b>	
2	15	02	1.10	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	1	1	1	100	1 Dokumen	1	
2	15	02	1.10	04	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	1 Dokumen	1	1	1	100	1 Dokumen	1	
2	15	02	1.10	06	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi	1 Dokumen	1	1	1	100	1 Dokumen	1	





					Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provins								
2	15	02	1.02		<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>	<b>Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi Yang Tersedia</b>	<b>36.880 Unit</b>						<b>21.645 Unit</b>	
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	36.649 Unit	1.770	1.770	1.770	100	21.467 Unit	1.770	
2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	231 Unit	131	131	131	100	178 Unit	131	
2	15	02	1.03		<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>	<b>Jumlah Terminal Tipe B Yang Terpelihara dan Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersusun</b>	<b>9 Unit</b>					<b>8 Unit</b>		
2	15	02	1.03	06	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	2 Unit	0	0	0	0	2 Unit	0	





2	15	02	1.03	07	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2 Unit	2	2	2	100	2 Unit	2
2	15	02	1.03	08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Menyenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	2 Unit	0	0	0	0	2 Unit	0
2	15	02	1.03	10	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	0	0	0	0	0 Unit	0
2	15	02	1.03	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	2	2	2	100	2 Unit	2
2	15	02	3.05		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>	<b>Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi yang tersusun</b>	<b>122 Laporan</b>					<b>62 Laporan</b>	
2	15	02	3.05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	120 Laporan	36	36	36	100	60 Laporan	36





2	15	02	3.05	05	Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	2 Laporan	2	2	2	100	2 Laporan	2	
2	15	02	1.07		<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Jumlah Auditor Dan Inspektor Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang tersedia dan Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang tersusun</b>	<b>8 Laporan &amp; 13 Orang</b>					<b>8 Laporan &amp; 13 Orang</b>		
2	15	02	1.07	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	1 Laporan	1	1	1	100	1 Laporan	1	
2	15	02	1.07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	1	1	1	100	1 Laporan	1	
2	15	02	1.07	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	13 Orang	13	13	13	100	13 Orang	13	





2	15	02	1.07	15	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	6 Laporan	3	3	3	100	6 Laporan	3	
2	15	02	1.08		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Tersedia</b>	<b>25 Laporan &amp; 60 Unit</b>					<b>25 Laporan &amp; 60 Unit</b>		
2	15	02	1.08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	25 Laporan	15	15	15	100	25 Laporan	15	
2	15	02	1.08	03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	60 Unit	60	60	60	100	60 Unit	60	





						Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								
2	15	02	1.10		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersusun	1 Dokumen						1 Dokumen	
2	15	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1	1	1	100	1 Dokumen	1	
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang terpenuhi	1 Unit						10 Unit	





2	15	02	1.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	1 Unit	1	0	1	100	10 Unit	1	
2	15	02	1.15		<b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang tersusun</b>	<b>1 Dokumen &amp; 1 Laporan</b>					<b>1 Dokumen &amp; 1 Laporan</b>		
2	15	02	1.15	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	1	1	1	100	1 Dokumen	1	





2	15	02	1.15	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1	1	1	100	1 Laporan	1	
2	15	02	1.06		<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b>	<b>Jumlah Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b>	<b>17 Laporan</b>					<b>13 Laporan</b>		
2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	17 Laporan	10	10	10	100	13 Laporan	10	
2	15	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Konektivitas Laut</b>						<b>3 Dokumen, 11 Laporan, 6 Unit &amp; 1 Orang</b>		
2	15	03	1.03		<b>Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan</b>	<b>Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi yang tersusun</b>	<b>3 Laporan</b>					<b>3 Laporan</b>		





2	15	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	3 Laporan	2	2	2	100	3 Laporan	2	
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<b>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang tersusun</b>	<b>1 Laporan</b>					<b>1 Laporan</b>		
2	15	03	1.05	04	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan	1 Laporan	1	1	1	100	1 Laporan	1	





					Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi								
2	15	03	1.07		<b>Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tarif ASDP yang tersusun</b>	<b>2 Dokumen &amp; 2 Laporan</b>						<b>2 Dokumen &amp; 0 Laporan</b>	
2	15	03	1.07	01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2	2	2	100	2 Dokumen	2	





2	15	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2	2	2	100	0 Laporan	2	
2	15	03	1.08		<b>Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	<b>Jumlah Dokumen Rencana Induk Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang tersusun</b>	<b>1 Dokumen &amp; 1 Laporan</b>					<b>1 Dokumen &amp; 1 Laporan</b>		
2	15	03	1.08	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	1	1	1	100	1 Dokumen	1	
2	15	03	1.08	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana	1 Laporan	1	1	1	100	1 Laporan	1	





					(DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional								
2	15	03	1.09		<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	<b>Jumlah persyaratan perizinan pembangunan dan operasional Pelabuhan Pengumpan Regional yang terpenuhi</b>	<b>3 Unit &amp; 1 Laporan</b>						<b>3 Unit &amp; 1 Laporan</b>	
2	15	03	1.09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	1	1	1	100	Unit	1	
2	15	03	1.09	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	1 Unit	1	1	1	100	1 Unit	1	
2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1 Unit	1	1	1	100	1 Unit	1	
2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	1	1	1	100	1 Laporan	1	





2	15	03	1.09	05	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	1 Unit	1	1	1	100	1 Unit	1	
2	15	03	1.10		<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Fasilitas Pelayanan angkutan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang terpenuhi dan Jumlah laporan Persyaratan Perizinan operasional pelabuhan sungai danau dan penyeberangan yang terpenuhi</b>	<b>2 Laporan, 2 Unit &amp; 1 Orang</b>					<b>2 Laporan, 1 Unit &amp; 1 Orang</b>		
2	15	03	1.10	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	1 Laporan	1	1	1	100	1 Laporan	1	





2	15	03	1.10	06	Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	1 Orang	1	1	1	100	1 Orang	1	
2	15	03	1.10	08	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1	1	1	100	1 Laporan	1	
2	15	03	1.10	09	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	2 Unit	2	2	2	100	2 Unit	2	
2	15	03	1.01		<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah</b>	<b>Jumlah Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara</b>	<b>1 Laporan &amp; 1 Unit</b>					<b>1 Laporan &amp; 1 Unit</b>		





					<b>Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi</b>	<b>Elektronik yang terpenuhi</b>								
2	15	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	1 Unit	1	1	1	100	1 Unit	1	
2	15	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1 Laporan	1	1	1	100	1 Laporan	1	
2	15	03	1.02		<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional</b>	<b>Jumlah persyaratan perolehan izin angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang terpenuhi</b>	<b>1 Unit</b>					<b>1 Unit</b>		





2	15	03	1.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	1 Unit	1	1	1	100	1 Unit	1	
2	15	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	2 Laporan	2	2	2	100	2 Laporan	1	
2	15	03	1.06		<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut,</b>	<b>Jumlah laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait</b>	<b>1 Dokumen &amp; 1 Laporan</b>					<b>1 Dokumen &amp; 2 Laporan</b>		





					<b>Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</b>	<b>dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas yang tersusun</b>											
2	15	03	1.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1	1	1	1	100	1 Dokumen	1			
2	15	03	1.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan	2 Laporan	2	2	2	2	100	2 Laporan	2			





					Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas								
2	15	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api</b>	<b>1 Dokumen &amp; 1 Laporan</b>						<b>1 Dokumen &amp; 1 Laporan</b>	
2	15	05	2.01		<b>Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian</b>	<b>Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian yang tersusun</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1 Dokumen</b>	<b>0</b>
2	15	05	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	0	0	0	0		1 Dokumen	0
2	15	05	1.02		<b>Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan, dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah yang tersusun</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1 Laporan</b>	<b>1</b>
2	15	05	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Koordinasi dan	1 Laporan	1	1	1	100		1 Laporan	1





				Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah									
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--





## **B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan "Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan. Capaian kinerja pelayanan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah di ukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dapat di lihat pada tabel di bawah ini :





Tabel. 2 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

No	Indikator Kinerja Utama	SPM/ Standar Nasional	IK K (PP - 6/08)	Target Renstra SKPD 2025-2029 (Tahun Ke-)					Realisasi Capaian		Proyeksi Realisasi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	
				Tahun N-2	Tahun N-1	Tahun N	Tahun N+1	Tahun N+2	Tahun N-2	Tahun N-1	Tahun N	Tahun N+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	RASIO		0,6	0,614	0,624	0,635	0,645	0,67		0,0624	0,635	Dihitung dengan penjumlahan Rasio Konektivitas Darat dan Rasio Konektivitas Laut





### **C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

- i. Transportasi Darat
  1. Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas Jalan
  2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan
    - a. Fasilitas Keselamatan Barupa Rambu, Pagar Maupun Marka Jalan Serta Fasilitas Penunjang Lainnya Masih Minim;
    - b. Jumlah Pelayanan Angkutan Belum Memadai.
  3. Peningkatan Pengawasan Lalu Lintas Jalan
  4. Peningkatan Pelayanan Terminal
  5. Peningkatan kajian studi kelayakan penentuan lokasi trase
  6. Peningkatan Sumber Daya Aparatur
- ii. Transportasi laut
  1. Peningkatan Pelayanan Pelabuhan Laut
  2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Laut
    - a. Peningkatan Aksesibilitas Transportasi Laut
    - b. Sarana Navigasi Masih Minim
  3. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Transportasi Laut
  4. Peningkatan Sumber Daya Aparatur
  5. Peningkatan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan

### **D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Adapun hasil analisis kebutuhan awal pada rancangan renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 yang disusun dengan memperhatikan beberapa pertimbangan tersebut di atas, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:





Tabel II.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Tengah

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6 Dokumen, 10 Laporan, 1 Data, 66 Unit, 7 Paket, 120 Orang/Bulan, & 40 Orang	Rp 24.880.631.342,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6 Dokumen, 10 Laporan, 1 Data, 66 Unit, 7 Paket, 120 Orang/Bulan, & 40 Orang	Rp 24.880.631.342,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen, 3 Laporan & 1 Data	Rp 1.091.768.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen, 3 Laporan & 1 Data	Rp 1.091.768.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 350.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 350.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2 Dokumen	Rp 500.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2 Dokumen	Rp 500.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun	3 Laporan	Rp 90.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun	3 Laporan	Rp 90.000.000,00	





Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	Rp 151.768.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	Rp 151.768.000,00	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun</b>	<b>1 Dokumen, 1 Laporan &amp; 120 Orang/Bulan</b>	<b>Rp 13.034.861.863,00</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun</b>	<b>1 Dokumen, 1 Laporan &amp; 120 Orang/Bulan</b>	<b>Rp 13.034.861.863,00</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/Bulan	Rp 12.700.511.863,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/Bulan	Rp 12.700.511.863,00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun	1 Dokumen	Rp 334.350.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun	1 Dokumen	Rp 334.350.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	Rp -	





			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>Rp 48.719.000,00</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>Rp 48.719.000,00</b>	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 48.719.000,00		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 48.719.000,00	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Yang Tersedia dan Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	<b>1 Paket &amp; 40 Orang</b>	<b>Rp 248.618.481,00</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Yang Tersedia dan Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	<b>1 Paket &amp; 40 Orang</b>	<b>Rp 248.618.481,00</b>	





	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan Yang Tersedia	1 Paket	Rp 104.060.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Yang Tersedia	1 Paket	Rp 104.060.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40 Orang	Rp 144.558.481,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40 Orang	Rp 144.558.481,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<b>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Tersusun</b>	<b>5 Paket &amp; 1 Laporan</b>	<b>Rp 1.023.148.371,00</b>	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<b>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Tersusun</b>	<b>5 Paket &amp; 1 Laporan</b>	<b>Rp 1.023.148.371,00</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 15.341.727,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 15.341.727,00	





Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 410.735.388,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 410.735.388,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 40.668.595,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 40.668.595,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp 519.681.116,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp 519.681.116,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 36.721.545,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 36.721.545,00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan</b>	<b>12 Unit &amp; 1 Paket</b>	<b>Rp 7.425.806.730,00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan</b>	<b>12 Unit &amp; 1 Paket</b>	<b>Rp 7.425.806.730,00</b>
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	Rp 97.680.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	Rp 97.680.000,00
Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Rp 128.126.730,00	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Rp 128.126.730,00





	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Rp 7.000.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Rp 7.000.000.000,00	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp -	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp -	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp 200.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp 200.000.000,00	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>Rp 1.086.345.897,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>Rp 1.086.345.897,00</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 17.270.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 17.270.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	Rp 251.328.897,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	Rp 251.328.897,00	





Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 194.377.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 194.377.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 623.370.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 623.370.000,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara</b>	<b>54 Unit</b>	<b>Rp 921.363.000,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara</b>	<b>54 Unit</b>	<b>Rp 921.363.000,00</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	Rp 494.527.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	Rp 494.527.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	1 Unit	Rp 176.836.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	1 Unit	Rp 176.836.000,00





	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp 250.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp 250.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Rp -	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Rp -
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>Konektivitas Darat, Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal</b>	<b>5 Dokumen, 109 Laporan, 21.723 Unit &amp; 13 Orang</b>	<b>Rp 7.848.681.951,84</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>Konektivitas Darat, Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal</b>	<b>5 Dokumen, 109 Laporan, 21.723 Unit &amp; 13 Orang</b>	<b>Rp 7.848.681.951,84</b>
	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>		<b>Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>Rp 92.200.000,00</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>		<b>Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>Rp 92.200.000,00</b>
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	Rp -	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	Rp -
	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu		Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana	1 Dokumen	Rp 47.000.000,00	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu		Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi	1 Dokumen	Rp 47.000.000,00





Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi		Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi			Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi		Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi			
Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi		Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provins	1 Dokumen	Rp 45.200.000,00	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi		Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provins	1 Dokumen	Rp 45.200.000,00	
<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>		<b>Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi Yang Tersedia</b>	<b>21.645 Unit</b>	<b>Rp 6.491.631.404,00</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>		<b>Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi Yang Tersedia</b>	<b>21.645 Unit</b>	<b>Rp 6.491.631.404,00</b>	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	21467 Unit	Rp 6.241.631.404,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	21467 Unit	Rp 6.241.631.404,00	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	178 Unit	Rp 250.000.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	178 Unit	Rp 250.000.000,00	
<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>		<b>Jumlah Terminal Tipe B Yang Terpelihara dan Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek</b>	<b>8 Unit</b>	<b>Rp 18.950.000,00</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>		<b>Jumlah Terminal Tipe B Yang Terpelihara dan Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam</b>	<b>8 Unit</b>	<b>Rp 18.950.000,00</b>	





			<b>Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersusun</b>				<b>Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersusun</b>			
	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B		Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	2 Unit	Rp 18.950.000,00	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	2 Unit	Rp 18.950.000,00	
	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)		Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2 Unit		Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2 Unit		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B		Jumlah Terminal yang menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	2 Unit		Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	2 Unit		
	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang		Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	0 Unit		Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	0 Unit		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal		Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan	2 Unit		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang	2 Unit		





	Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)		Penunjang) yang terhabilitasi dan terpelihara			Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)		terhabilitasi dan terpelihara		
	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>		<b>Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi yang tersusun</b>	<b>62 Laporan</b>	<b>Rp 124.474.799,75</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>		<b>Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi yang tersusun</b>	<b>62 Laporan</b>	<b>Rp 124.474.799,75</b>
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	60 Laporan	Rp 84.474.799,75	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	60 Laporan	Rp 84.474.799,75
	Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi		Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	2 Laporan	Rp 40.000.000,00	Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi		Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	2 Laporan	Rp 40.000.000,00
	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>		<b>Jumlah Auditor Dan Inspektur Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang tersedia dan Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi</b>	<b>8 Laporan &amp; 13 Orang</b>	<b>Rp 857.868.448,09</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>		<b>Jumlah Auditor Dan Inspektur Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang tersedia dan Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi</b>	<b>8 Laporan &amp; 13 Orang</b>	<b>Rp 857.868.448,09</b>





			<b>Keselamatan LLAJ di Jalan yang tersusun</b>				<b>Keselamatan LLAJ di Jalan yang tersusun</b>			
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	1 Laporan	Rp 282.868.448,09		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	1 Laporan	Rp 282.868.448,09
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	Rp 500.640.000,00		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	Rp 500.640.000,00
	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ		Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	13 Orang	Rp 26.840.000,00		Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	13 Orang	Rp 26.840.000,00
	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala		Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji	6 Laporan	Rp 47.520.000,00		Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	6 Laporan	Rp 47.520.000,00





Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Berkala Kendaraan Bermotor			Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor					
<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Tersedia</b>	<b>25 Laporan &amp; 60 Unit</b>	<b>Rp 103.200.000,00</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Tersedia</b>	<b>25 Laporan &amp; 60 Unit</b>	<b>Rp 103.200.000,00</b>	
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi		Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	25 Laporan	Rp 100.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi		Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	25 Laporan	Rp 100.000.000,00	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota	60 Unit	Rp 3.200.000,00	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	60 Unit	Rp 3.200.000,00	





Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersusun</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>Rp 13.000.000,00</b>	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersusun</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>Rp 13.000.000,00</b>	
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Rp 13.000.000,00	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Rp 13.000.000,00	
<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara</b>	<b>10 Unit</b>	<b>Rp -</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang terpenuhi</b>	<b>10 Unit</b>	<b>Rp -</b>	





			<b>Elektronik yang terpenuhi</b>							
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	10 Unit	Rp -	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	10 Unit	Rp -	
<b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang tersusun</b>	<b>1 Dokumen &amp; 1 Laporan</b>	<b>Rp 66.816.550,00</b>	<b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang tersusun</b>	<b>1 Dokumen &amp; 1 Laporan</b>	<b>Rp 66.816.550,00</b>	
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif	1 Dokumen	Rp 21.680.850,00	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas	1 Dokumen	Rp 21.680.850,00	





	Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Rp 45.135.700,00	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Rp 45.135.700,00	
	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b>		<b>Jumlah Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b>	<b>13 Laporan</b>	<b>Rp 80.540.750,00</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b>		<b>Jumlah Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b>	<b>13 Laporan</b>	<b>Rp 80.540.750,00</b>	
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	13 Laporan	Rp 80.540.750,00	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	13 Laporan	Rp 80.540.750,00	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Provinsi Sulawesi</b>	<b>Konektivitas Laut</b>	<b>3 Dokumen, 13 Laporan, 7</b>	<b>Rp 22.472.117.020,00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>Konektivitas Laut</b>	<b>3 Dokumen, 13 Laporan, 7</b>	<b>Rp 22.472.117.020,00</b>	





		si Tenga h		Unit & 1 Orang				Unit & 1 Orang			
	<b>Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan</b>		<b>Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi yang tersusun</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>Rp -</b>		<b>Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan</b>		<b>Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi yang tersusun</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>Rp -</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	3 Laporan	Rp -		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	3 Laporan	Rp -
	<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan</b>		<b>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>Rp 55.572.000,00</b>		<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan</b>		<b>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>Rp 55.572.000,00</b>





	<p><b>Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b></p>		<p><b>Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang tersusun</b></p>			<p><b>Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b></p>		<p><b>Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang tersusun</b></p>			
	<p>Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</p>		<p>Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan</p>	<p>1 Laporan</p>	<p>Rp 55.572.000,00</p>	<p>Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</p>		<p>Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah</p>	<p>1 Laporan</p>	<p>Rp 55.572.000,00</p>	





			Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi					Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			
	<b>Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tarif ASDP yang tersusun</b>	<b>2 Dokumen &amp; 0 Laporan</b>	<b>Rp 13.860.000,00</b>			<b>Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tarif ASDP yang tersusun</b>	<b>2 Dokumen &amp; 0 Laporan</b>	<b>Rp 13.860.000,00</b>	
	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar	2 Dokumen	Rp 13.860.000,00			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp 13.860.000,00	





			Daerah Kabupaten/Kota							
Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	Rp -	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	Rp -
<b>Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional</b>			<b>Jumlah Dokumen Rencana Induk Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang tersusun</b>	<b>1 Dokumen &amp; 1 Laporan</b>	<b>Rp 67.914.620,00</b>	<b>Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional</b>		<b>Jumlah Dokumen Rencana Induk Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang tersusun</b>	<b>1 Dokumen &amp; 1 Laporan</b>	<b>Rp 67.914.620,00</b>
Pelaksanaan Penyusunan Rencana			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan	1 Dokumen	Rp 44.924.950,00	Pelaksanaan Penyusunan Rencana		Jumlah Dokumen Rencana Induk dan	1 Dokumen	Rp 44.924.950,00





Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Rp 22.989.670,00	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Rp 22.989.670,00	
<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</b>		<b>Jumlah persyaratan perizinan pembangunan dan operasional Pelabuhan Pengumpan Regional yang terpenuhi</b>	<b>5 Unit &amp; 1 Laporan</b>	<b>Rp 10.024.849.800,00</b>	<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</b>		<b>Jumlah persyaratan perizinan pembangunan dan operasional Pelabuhan Pengumpan Regional yang terpenuhi</b>	<b>5 Unit &amp; 1 Laporan</b>	<b>Rp 10.024.849.800,00</b>	





Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	Rp 10.000.000.000,00	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	Rp 10.000.000.000,00	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	1 Unit	Rp -	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	1 Unit	Rp -	
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1 Unit	Rp -	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1 Unit	Rp -	
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Rp 24.849.800,00	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Rp 24.849.800,00	
Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	1 Unit		Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	1 Unit		
<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek</b>		<b>Jumlah Fasilitas Pelayanan angkutan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan</b>	<b>2 Laporan, 1 Unit &amp; 1 Orang</b>	<b>Rp 12.000.000.000,00</b>	<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek</b>		<b>Jumlah Fasilitas Pelayanan angkutan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang</b>	<b>2 Laporan, 1 Unit &amp; 1 Orang</b>	<b>Rp 12.000.000.000,00</b>	





Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang terpenuhi dan Jumlah laporan Persyaratan Perizinan operasional pelabuhan sungai danau dan penyeberangan yang terpenuhi			Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang terpenuhi dan Jumlah laporan Persyaratan Perizinan operasional pelabuhan sungai danau dan penyeberangan yang terpenuhi			
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	1 Laporan	Rp -	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	1 Laporan	Rp -	
Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	1 Orang		Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau		Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	1 Orang		





<p>Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>		<p>Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</p>	<p>1 Laporan</p>		<p>Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>		<p>Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</p>	<p>1 Laporan</p>		
<p>Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>		<p>Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia</p>	<p>2 Unit</p>	<p>Rp 12.000.000.000,00</p>	<p>Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>		<p>Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia</p>	<p>2 Unit</p>	<p>Rp 12.000.000.000,00</p>	
<p><b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan</b></p>		<p><b>Jumlah Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha</b></p>	<p><b>1 Laporan &amp; 1 Unit</b></p>	<p><b>Rp 43.982.500,00</b></p>	<p><b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada</b></p>		<p><b>Jumlah Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara</b></p>	<p><b>1 Laporan &amp; 1 Unit</b></p>	<p><b>Rp 43.982.500,00</b></p>	





antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi		Terintegrasi Secara Elektronik yang terpenuhi			Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi		Elektronik yang terpenuhi			
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	1 Unit	Rp 13.982.500,00	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	1 Unit	Rp 13.982.500,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1 Laporan	Rp 30.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1 Laporan	Rp 30.000.000,00	
<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang</b>		<b>Jumlah persyaratan perolehan izin angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam</b>	<b>1 Unit</b>	<b>Rp 51.200.750,00</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang</b>		<b>Jumlah persyaratan perolehan izin angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam Pelayanan Perizinan Berusaha</b>	<b>1 Unit</b>	<b>Rp 51.200.750,00</b>	





Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional		Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang terpenuhi			Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional		Terintegrasi Secara Elektronik Yang terpenuhi			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	2 Laporan	Rp 51.200.750,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	2 Laporan	Rp 51.200.750,00	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan		Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	1 Unit	Rp -	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan		Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang	1 Unit	Rp -	





	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan			Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Memenuhi Syarat Perizinan		
	<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</b>		<b>Jumlah laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas yang tersusun</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>Rp 214.737.350,00</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</b>		<b>Jumlah laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas yang tersusun</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>Rp 214.737.350,00</b>
4	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan		Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan	1 Dokumen	Rp 28.389.350,00	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan		Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan,	1 Dokumen	Rp 28.389.350,00





Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut,		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau	2 Laporan	Rp 186.348.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut,		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut,	2 Laporan	Rp 186.348.000,00	





	Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>	<b>Provisi Sulawesi Tengah</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api</b>	<b>1 Dokumen &amp; 1 Laporan</b>	<b>Rp 16.499.890,00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api</b>	<b>1 Dokumen &amp; 1 Laporan</b>	<b>Rp 16.499.890,00</b>	
	<b>Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian</b>		<b>Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian yang tersusun</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>Rp -</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian</b>		<b>Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian yang tersusun</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>Rp -</b>	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian		Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	Rp -	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian		Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	Rp -	
	<b>Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan, dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>Rp 16.499.890,00</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan, dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah yang tersusun</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>Rp 16.499.890,00</b>	





			<b>Daerah yang tersusun</b>								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	1 Laporan	Rp 16.499.890,00		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	1 Laporan	Rp 16.499.890,00





## **E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025**

Usulan program dan kegiatan Tahun 2026 Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui dana APBD telah dilaksanakan dengan menitik beratkan pada kebijakan peningkatan pelayanan transportasi baik Darat dan Laut. Sasaran strategis yang dapat ditempuh adalah bagaimana meningkatkan aksesibilitas transportasi pada daerah-daerah terpencil dengan menyiapkan sarana dan prasarana transportasi.

- A. Pada Tahun 2026 ini telah diusulkan melalui belanja langsung 4 (Empat) Program dan 26 (Dua Puluh Enam) Kegiatan serta 7 (Kegiatan) UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Kelas A dengan nilai Rp. 56.545.361.862,84.

Usulan tersebut merupakan usulan berdasarkan skala prioritas yang nantinya dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan transportasi di Provinsi Sulawesi Tengah dan yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan masyarakat.

Usulan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :





Tabel II.4 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2026

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan		Unit Kerja
						2026		
			Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	Rasio			Rp 55.217.930.203,84	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6 Dokumen, 10 Laporan, 1 Data, 66 Unit, 7 Paket, 120 Orang/Bulan, & 40 Orang	Rp 24.880.631.342,00	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen, Laporan, Data, Unit, Paket & Orang		5 Dokumen, 3 Laporan & 1 Data	Rp 1.091.768.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		3 Dokumen	Rp 350.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen		2 Dokumen	Rp 500.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun	Laporan		3 Laporan	Rp 90.000.000,00	





	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data		1 Data	Rp 151.768.000,00	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun</b>	<b>Dokumen, Laporan &amp; Orang/Bulan</b>		<b>1 Dokumen, 1 Laporan &amp; 120 Orang/Bulan</b>	<b>Rp 13.034.861.863,00</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		120 Orang/ Bulan	Rp 12.700.511.863,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun	Dokumen		1 Dokumen	Rp 334.350.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1 Laporan	Rp -	





	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun</b>	<b>Laporan</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>Rp 48.719.000,00</b>	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		1 Laporan	Rp 48.719.000,00	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Yang Tersedia dan Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	<b>Paket &amp; Orang</b>		<b>1 Paket &amp; 40 Orang</b>	<b>Rp 248.618.481,00</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Yang Tersedia	Paket		1 Paket	Rp 104.060.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		40 Orang	Rp 144.558.481,00	





			Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Tersusun</b>	<b>Paket &amp; Laporan</b>		<b>5 Paket &amp; 1 Laporan</b>	<b>Rp 1.023.148.371,00</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1 Paket	Rp 15.341.727,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1 Paket	Rp 410.735.388,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2 Paket	Rp 40.668.595,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1 Laporan	Rp 519.681.116,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1 Paket	Rp 36.721.545,00





	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan</b>	<b>Paket dan Unit</b>		<b>12 Unit &amp; 1 Paket</b>	<b>Rp 7.425.806.730,00</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		3 Unit	Rp 97.680.000,00	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		1 Paket	Rp 128.126.730,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		2 Unit	Rp 7.000.000.000,00	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	Rp -	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		5 Unit	Rp 200.000.000,00	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia</b>	<b>Laporan</b>		<b>4 Laporan</b>	<b>Rp 1.086.345.897,00</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1 Laporan	Rp 17.270.000,00	





	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan		1 Laporan	Rp 251.328.897,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		1 Laporan	Rp 194.377.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1 Laporan	Rp 623.370.000,00	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara</b>	<b>Unit</b>		<b>54 Unit</b>	<b>Rp 921.363.000,00</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		45 Unit	Rp 494.527.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	Unit		1 Unit	Rp 176.836.000,00	





	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2 Unit	Rp 250.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		7 Unit	Rp -	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>Konektivitas Darat, Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal</b>	<b>Dokumen, Laporan, Unit &amp; Orang</b>		<b>5 Dokumen, 109 Laporan, 21.723 Unit &amp; 13 Orang</b>	<b>Rp 7.848.681.951,84</b>	
	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>		<b>Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>	<b>Dokumen</b>		<b>3 Dokumen</b>	<b>Rp 92.200.000,00</b>	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen		1 Dokumen	Rp -	
	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi		Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Dokumen		1 Dokumen	Rp 47.000.000,00	
	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi		Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi	Dokumen		1 Dokumen	Rp 45.200.000,00	





	Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi		Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provins				
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>		<b>Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi Yang Tersedia</b>	<b>Unit</b>		<b>21.645 Unit</b>	<b>Rp 6.491.631.404,00</b>
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit		21467 Unit	Rp 6.241.631.404,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit		178 Unit	Rp 250.000.000,00
	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>		<b>Jumlah Terminal Tipe B Yang Terpelihara dan Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersusun</b>	<b>Unit</b>		<b>8 Unit</b>	<b>Rp 18.950.000,00</b>
	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B		Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	Unit		2 Unit	Rp 18.950.000,00





	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)		Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit		2 Unit		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B		Jumlah Terminal yang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Unit		2 Unit		
	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang		Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit		0 Unit		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)		Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit		2 Unit		
	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>		<b>Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi yang tersusun</b>	<b>Laporan</b>		<b>62 Laporan</b>	<b>Rp 124.474.799,75</b>	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan		60 Laporan	Rp 84.474.799,75	





	Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi		Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan		2 Laporan	Rp 40.000.000,00	
	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>		<b>Jumlah Auditor Dan Inspektur Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang tersedia dan Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang tersusun</b>	<b>Laporan &amp; Orang</b>		<b>8 Laporan &amp; 13 Orang</b>	<b>Rp 857.868.448,09</b>	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Laporan		1 Laporan	Rp 282.868.448,09	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan		1 Laporan	Rp 500.640.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ		Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang		13 Orang	Rp 26.840.000,00	





	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan		6 Laporan	Rp 47.520.000,00	
	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Tersedia</b>	<b>Laporan &amp; Unit</b>		<b>25 Laporan &amp; 60 Unit</b>	<b>Rp 103.200.000,00</b>	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi		Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan		25 Laporan	Rp 100.000.000,00	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	Unit		60 Unit	Rp 3.200.000,00	





			Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					
	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersusun</b>	<b>Dokumen</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>Rp 13.000.000,00</b>	
	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen		1 Dokumen	Rp 13.000.000,00	
	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang terpenuhi</b>	<b>Unit</b>		<b>10 Unit</b>	<b>Rp -</b>	





	<p>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p>		<p>Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan</p>	<p>Unit</p>		<p>10 Unit</p>	<p>Rp -</p>	
	<p><b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b></p>		<p><b>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang tersusun</b></p>	<p><b>Dokumen &amp; Laporan</b></p>		<p><b>1 Dokumen &amp; 1 Laporan</b></p>	<p><b>Rp 66.816.550,00</b></p>	
	<p>Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>		<p>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</p>	<p>Dokumen</p>		<p>1 Dokumen</p>	<p>Rp 21.680.850,00</p>	





	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan		1 Laporan	Rp 45.135.700,00	
	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b>		<b>Jumlah Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b>	<b>Laporan</b>		<b>13 Laporan</b>	<b>Rp 80.540.750,00</b>	
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan		13 Laporan	Rp 80.540.750,00	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>Konektivitas Laut</b>	<b>Dokumen, Laporan, Unit &amp; Orang</b>		<b>3 Dokumen, 13 Laporan, 7 Unit &amp; 1 Orang</b>	<b>Rp 22.472.117.020,00</b>	
	<b>Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan</b>		<b>Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi yang tersusun</b>	<b>Laporan</b>		<b>3 Laporan</b>	<b>Rp -</b>	





	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Laporan		3 Laporan	Rp -	
	<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang tersusun</b>	Laporan		1 Laporan	Rp 55.572.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian		Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan	Laporan		1 Laporan	Rp 55.572.000,00	





	Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi					
	<b>Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tarif ASDP yang tersusun</b>	<b>Dokumen &amp; Laporan</b>		<b>2 Dokumen &amp; 0 Laporan</b>	<b>Rp 13.860.000,00</b>	
	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		2 Dokumen	Rp 13.860.000,00	





	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		0 Laporan	Rp -	
	<b>Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional</b>		<b>Jumlah Dokumen Rencana Induk Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang tersusun</b>	<b>Dokumen &amp; Laporan</b>		<b>1 Dokumen &amp; 1 Laporan</b>	<b>Rp 67.914.620,00</b>	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen		1 Dokumen	Rp 44.924.950,00	
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja		Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana	Laporan		1 Laporan	Rp 22.989.670,00	





	(DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional					
	<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</b>		<b>Jumlah persyaratan perizinan pembangunan dan operasional Pelabuhan Pengumpan Regional yang terpenuhi</b>	<b>Unit &amp; Laporan</b>		<b>5 Unit &amp; 1 Laporan</b>	<b>Rp 10.024.849.800,00</b>	
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Unit		1 Unit	Rp 10.000.000.000,00	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Unit		1 Unit	Rp -	
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Unit		1 Unit	Rp -	
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan		1 Laporan	Rp 24.849.800,00	





	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	Unit		1 Unit		
	<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Fasilitas Pelayanan angkutan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang terpenuhi dan Jumlah laporan Persyaratan Perizinan operasional pelabuhan sungai danau dan penyeberangan yang terpenuhi</b>	Laporan, Unit & Orang		2 Laporan, 1 Unit & 1 Orang	Rp 12.000.000.000,00	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Laporan		1 Laporan	Rp -	





	Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau		Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Orang		1 Orang		
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan		1 Laporan		
	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit		2 Unit	Rp 12.000.000.000,00	
	<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah</b>		<b>Jumlah Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara</b>	<b>Unit &amp; Laporan</b>		<b>1 Laporan &amp; 1 Unit</b>	<b>Rp 43.982.500,00</b>	





Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Elektronik yang terpenuhi						
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Unit			1 Unit	Rp 13.982.500,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Laporan			1 Laporan	Rp 30.000.000,00	
<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional</b>	<b>Jumlah persyaratan perolehan izin angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang terpenuhi</b>	Unit			1 Unit	Rp 51.200.750,00	





	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Laporan		2 Laporan	Rp 51.200.750,00	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	Unit		1 Unit	Rp -	
	<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut,</b>		<b>Jumlah laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait</b>	<b>Laporan</b>		<b>2 Laporan</b>	<b>Rp 214.737.350,00</b>	





	<b>Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</b>		<b>dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas yang tersusun</b>					
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen		1 Dokumen	Rp 28.389.350,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan	Laporan		2 Laporan	Rp 186.348.000,00	





	Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas					
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api</b>	<b>Dokumen &amp; Laporan</b>		<b>1 Dokumen &amp; 1 Laporan</b>	<b>Rp 16.499.890,00</b>	
	<b>Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian</b>		<b>Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian yang tersusun</b>	<b>Dokumen</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>Rp -</b>	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian		Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	<b>Dokumen</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>Rp -</b>	
	<b>Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan, dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah yang tersusun</b>	<b>Laporan</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>Rp 16.499.890,00</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan		Jumlah Laporan Koordinasi dan	Laporan		1 Laporan	Rp 16.499.890,00	





	Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah		Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah					
--	---	--	---	--	--	--	--	--





### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **A. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan kebijakan nasional Sulawesi Tengah termasuk dalam sasaran strategis Nasional khususnya Dinas Perhubungan.

### **B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan**

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah kurun waktu 2025-2029 yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing perekonomian dan kompetitif dengan penerapan teknologi terpadu antara industri pengolahan dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan. Memantapkan jaringan infrastruktur transportasi serta berkembangnya jaringan jalan ke pusat-pusat kegiatan; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien.

Dalam mewujudkan dukungan tersebut penyelenggaraan transportasi harus berjalan efektif dan efisien guna menunjang dan mendorong keberhasilan pembangunan Daerah. Penyelenggaraan pelayanan transportasi yang efektif berkaitan dengan infrastuktur, ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan maksimalisasi daya guna dan minimalisasi biaya yang menjadi beban masyarakat. Yang menjadi tujuan dan sasaran untuk dicapai Dinas Perhubungan, Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

### **C. Program dan Kegiatan**

Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dijabarkan sebagaimana dalam tabel pencapaian, kajian usulan program / kegiatan dari kebutuhan OPD





Tabel III.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan 2027

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	Rp 6,00	7	8	9	
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6 Dokumen, 10 Laporan, 1 Data, 66 Unit, 7 Paket, 120 Orang/Bulan, & 40 Orang	Rp 24.880.631.342,00	Rp 24.880.631.342,00		6 Dokumen, 10 Laporan, 1 Data, 66 Unit, 7 Paket, 120 Orang/Bulan, & 40 Orang	Rp 40.569.738.827,04
01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 Dokumen, 3 Laporan & 1 Data	Rp 1.091.768.000,00	Rp 1.091.768.000,00		5 Dokumen, 3 Laporan & 1 Data	Rp 810.000.000,00
01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	Rp 350.000.000,00	Rp 350.000.000,00		3 Dokumen	Rp 350.000.000,00
01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun		2 Dokumen	Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00		2 Dokumen	Rp 250.000.000,00





01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun		3 Laporan	Rp 90.000.000,00	Rp 90.000.000,00		3 Laporan	Rp 70.000.000,00
01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1 Data	Rp 151.768.000,00	Rp 151.768.000,00		1 Data	Rp 140.000.000,00
<b>01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>1 Dokumen, 1 Laporan &amp; 120 Orang/Bulan</b>	<b>Rp 13.034.861.863,00</b>	<b>Rp 13.034.861.863,00</b>		<b>1 Dokumen, 1 Laporan &amp; 120 Orang/Bulan</b>	<b>Rp 12.709.738.827,04</b>
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		120 Orang/ Bulan	Rp 12.700.511.863,00	Rp 12.700.511.863,00		120 Orang/ Bulan	Rp 12.319.738.827,04
01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun		1 Dokumen	Rp 334.350.000,00	Rp 334.350.000,00		1 Dokumen	Rp 330.000.000,00
01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan		1 Laporan	Rp -	Rp -		1 Laporan	Rp 60.000.000,00





	Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun		1 Laporan	Rp 48.719.000,00	Rp 48.719.000,00		1 Laporan	Rp 45.000.000,00
01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	Rp 48.719.000,00	Rp 48.719.000,00		1 Laporan	Rp 45.000.000,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Yang Tersedia dan Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi		1 Paket & 40 Orang	Rp 248.618.481,00	Rp 248.618.481,00		1 Paket & 40 Orang	Rp 180.000.000,00
01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut		1 Paket	Rp 104.060.000,00	Rp 104.060.000,00		1 Paket	Rp 80.000.000,00





		Kelengkapan Yang Tersedia						
01.2.05.0010	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi		40 Orang	Rp 144.558.481,00	Rp 144.558.481,00		40 Orang Rp 100.000.000,00
01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Tersusun</b>		<b>5 Paket &amp; 1 Laporan</b>	<b>Rp 1.023.148.371,00</b>	<b>Rp 1.023.148.371,00</b>		<b>5 Paket &amp; 1 Laporan</b> <b>Rp 1.005.500.000,00</b>
01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	Rp 15.341.727,00	Rp 15.341.727,00		1 Paket Rp 15.500.000,00
01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	Rp 410.735.388,00	Rp 410.735.388,00		1 Paket Rp 400.000.000,00
01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	Rp 40.668.595,00	Rp 40.668.595,00		2 Paket Rp 40.000.000,00





01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	Rp 519.681.116,00	Rp 519.681.116,00		1 Laporan	Rp 515.000.000,00
01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	Rp 36.721.545,00	Rp 36.721.545,00		1 Paket	Rp 35.000.000,00
<b>01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan</b>		<b>12 Unit &amp; 1 Paket</b>	<b>Rp 7.425.806.730,00</b>	<b>Rp 7.425.806.730,00</b>		<b>12 Unit &amp; 1 Paket</b>	<b>Rp 7.412.500.000,00</b>
01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		3 Unit	Rp 97.680.000,00	Rp 97.680.000,00		3 Unit	Rp 90.000.000,00
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	Rp 128.126.730,00	Rp 128.126.730,00		1 Paket	Rp 122.500.000,00
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	Rp 7.000.000.000,00	Rp 7.000.000.000,00		2 Unit	Rp 2.000.000.000,00
01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	Rp -	Rp -		1 Unit	Rp 5.000.000.000,00
01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		5 Unit	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00		5 Unit	Rp 200.000.000,00





		Lainnya yang Disediakan							
<b>01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia</b>		<b>4 Laporan</b>	<b>Rp 1.086.345.897,00</b>	<b>Rp 1.086.345.897,00</b>		<b>4 Laporan</b>	<b>Rp 1.057.000.000,00</b>
01.2.08,0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	Rp 17.270.000,00	Rp 17.270.000,00		1 Laporan	Rp 17.000.000,00
01.2.08,0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		1 Laporan	Rp 251.328.897,00	Rp 251.328.897,00		1 Laporan	Rp 250.000.000,00
01.2.08,0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	Rp 194.377.000,00	Rp 194.377.000,00		1 Laporan	Rp 190.000.000,00
01.2.08,0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	Rp 623.370.000,00	Rp 623.370.000,00		1 Laporan	Rp 600.000.000,00
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara</b>		<b>54 Unit</b>	<b>Rp 921.363.000,00</b>	<b>Rp 921.363.000,00</b>		<b>54 Unit</b>	<b>Rp 1.100.000.000,00</b>





01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		45 Unit	Rp 494.527.000,00	Rp 494.527.000,00		45 Unit	Rp 450.000.000,00
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi		1 Unit	Rp 176.836.000,00	Rp 176.836.000,00		1 Unit	Rp 200.000.000,00
01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	Rp 250.000.000,00	Rp 250.000.000,00		2 Unit	Rp 200.000.000,00
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		7 Unit	Rp -	Rp -		7 Unit	Rp 250.000.000,00
2.15.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Konektivitas Darat, Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>5 Dokumen, 109 Laporan, 21.723 Unit &amp; 13 Orang</b>	<b>Rp 7.848.681.951,84</b>	<b>Rp 7.848.681.951,84</b>		<b>5 Dokumen, 109 Laporan, 21.723 Unit &amp; 13 Orang</b>	<b>Rp 9.350.000.000,00</b>
2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		3 Dokumen	Rp 92.200.000,00	Rp 92.200.000,00		3 Dokumen	Rp 195.000.000,00





2.15.02.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		1 Dokumen	Rp -	Rp -		1 Dokumen	Rp 65.000.000,00
2.15.02.1.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi		1 Dokumen	Rp 47.000.000,00	Rp 47.000.000,00		1 Dokumen	Rp 65.000.000,00
2.15.02.1.01.0006	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi		1 Dokumen	Rp 45.200.000,00	Rp 45.200.000,00		1 Dokumen	Rp 65.000.000,00
<b>2.15.02.1.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>	<b>Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi Yang Tersedia</b>		<b>21.645 Unit</b>	<b>Rp 6.491.631.404,00</b>	<b>Rp 6.491.631.404,00</b>		<b>21.645 Unit</b>	<b>Rp 6.740.000.000,00</b>
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia		21467 Unit	Rp 6.241.631.404,00	Rp 6.241.631.404,00		21467 Unit	Rp 6.295.000.000,00
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara		178 Unit	Rp 250.000.000,00	Rp 250.000.000,00		178 Unit	Rp 445.000.000,00
<b>2.15.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>	<b>Jumlah Terminal Tipe B Yang Terpelihara</b>		<b>8 Unit</b>	<b>Rp 18.950.000,00</b>	<b>Rp 18.950.000,00</b>		<b>8 Unit</b>	<b>Rp 305.000.000,00</b>





		<b>dan Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersusun</b>							
2.15.02.1.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi		2 Unit	Rp 18.950.000,00	Rp 18.950.000,00		2 Unit	Rp 45.000.000,00
2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)		2 Unit				2 Unit	Rp 115.000.000,00
2.15.02.1.03.0008	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Menyenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B		2 Unit				2 Unit	Rp 60.000.000,00
2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang		0 Unit				0 Unit	Rp -
2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan		2 Unit				2 Unit	Rp 85.000.000,00





	Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara							
2.15.02.3.05	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>	<b>Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi yang tersusun</b>		<b>62 Laporan</b>	<b>Rp 124.474.799,75</b>	<b>Rp 124.474.799,75</b>		<b>62 Laporan</b>	<b>Rp 200.000.000,00</b>
2.15.02.3.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		60 Laporan	Rp 84.474.799,75	Rp 84.474.799,75		60 Laporan	Rp 135.000.000,00
2.15.02.3.05.0005	Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi		2 Laporan	Rp 40.000.000,00	Rp 40.000.000,00		2 Laporan	Rp 65.000.000,00
2.15.02.107	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Jumlah Auditor Dan Inspektor Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang tersedia dan Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang tersusun</b>		<b>8 Laporan &amp; 13 Orang</b>	<b>Rp 857.868.448,09</b>	<b>Rp 857.868.448,09</b>		<b>8 Laporan &amp; 13 Orang</b>	<b>Rp 910.000.000,00</b>
2.15.02.107.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan		1 Laporan	Rp 282.868.448,09	Rp 282.868.448,09		1 Laporan	Rp 315.000.000,00





	Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi							
2.15.02.107.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		1 Laporan	Rp 500.640.000,00	Rp 500.640.000,00		1 Laporan	Rp 425.000.000,00
2.15.02.107.0001	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya		13 Orang	Rp 26.840.000,00	Rp 26.840.000,00		13 Orang	Rp 85.000.000,00
2.15.02.1.07.0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		6 Laporan	Rp 47.520.000,00	Rp 47.520.000,00		6 Laporan	Rp 85.000.000,00
2.15.02.1.08	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar</b>	<b>Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang</b>		<b>25 Laporan &amp; 60 Unit</b>	<b>Rp 103.200.000,00</b>	<b>Rp 103.200.000,00</b>		<b>25 Laporan &amp; 60 Unit</b>	<b>Rp 230.000.000,00</b>





	Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Tersedia							
2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	25 Laporan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00		25 Laporan	Rp 115.000.000,00	
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	60 Unit	Rp 3.200.000,00	Rp 3.200.000,00		60 Unit	Rp 115.000.000,00	
2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersusun	1 Dokumen	Rp 13.000.000,00	Rp 13.000.000,00		1 Dokumen	Rp 360.000.000,00	





2.15.02.1.10.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi		1 Dokumen	Rp 13.000.000,00	Rp 13.000.000,00		1 Dokumen	Rp 360.000.000,00
2.15.02.1.13	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang terpenuhi</b>		10 Unit	Rp -	Rp -		10 Unit	Rp 55.000.000,00
2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan		10 Unit	Rp -	Rp -		10 Unit	Rp 55.000.000,00
2.15.02.1.15	<b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang</b>	<b>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif</b>		1 Dokumen & 1 Laporan	Rp 66.816.550,00	Rp 66.816.550,00		1 Dokumen & 1 Laporan	Rp 230.000.000,00





	<b>Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang tersusun</b>							
2.15.02.1.15.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		1 Dokumen	Rp 21.680.850,00	Rp 21.680.850,00		1 Dokumen	Rp 115.000.000,00
2.15.02.1.15.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		1 Laporan	Rp 45.135.700,00	Rp 45.135.700,00		1 Laporan	Rp 115.000.000,00
2.15.02.1.06	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b>	<b>Jumlah Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu</b>		<b>13 Laporan</b>	<b>Rp 80.540.750,00</b>	<b>Rp 80.540.750,00</b>		<b>13 Laporan</b>	<b>Rp 125.000.000,00</b>





		<b>Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b>							
2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi		13 Laporan	Rp 80.540.750,00	Rp 80.540.750,00		13 Laporan	Rp 125.000.000,00
<b>2.15.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Konektivitas Laut</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>3 Dokumen, 13 Laporan, 7 Unit &amp; 1 Orang</b>	<b>Rp 22.472.117.020,00</b>	<b>Rp 22.472.117.020,00</b>		<b>3 Dokumen, 13 Laporan, 7 Unit &amp; 1 Orang</b>	<b>Rp 6.500.000.000,00</b>
2.15.03.1.03	<b>Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan</b>	<b>Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi yang tersusun</b>		3 Laporan	Rp -	Rp -		3 Laporan	Rp 150.000.000,00
2.15.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi		3 Laporan	Rp -	Rp -		3 Laporan	Rp 150.000.000,00
2.15.03.1.05	<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan</b>	<b>Jumlah Laporan Pengendalian dan</b>		1 Laporan	Rp 55.572.000,00	Rp 55.572.000,00		1 Laporan	Rp 180.000.000,00





	<p><b>Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b></p>	<p><b>Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang tersusun</b></p>						
2.15.03.1.05.004	<p>Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</p>	<p>Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</p>	1 Laporan	Rp 55.572.000,00	Rp 55.572.000,00		1 Laporan	Rp 180.000.000,00





2.15.03.1.07	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tarif ASDP yang tersusun		2 Dokumen & 0 Laporan	Rp 13.860.000,00	Rp 13.860.000,00		2 Dokumen & 0 Laporan	Rp 300.000.000,00
2.15.03.1.07.0001	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota		2 Dokumen	Rp 13.860.000,00	Rp 13.860.000,00		2 Dokumen	Rp 275.000.000,00
2.15.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas		0 Laporan	Rp -	Rp -		0 Laporan	Rp 25.000.000,00





		Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota							
2.15.03.1.08	<b>Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	<b>Jumlah Dokumen Rencana Induk Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang tersusun</b>		<b>1 Dokumen &amp; 1 Laporan</b>	<b>Rp 67.914.620,00</b>	<b>Rp 67.914.620,00</b>		<b>1 Dokumen &amp; 1 Laporan</b>	<b>Rp 800.000.000,00</b>
2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		1 Dokumen	Rp 44.924.950,00	Rp 44.924.950,00		1 Dokumen	Rp 450.000.000,00
2.15.03.1.08.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP)		1 Laporan	Rp 22.989.670,00	Rp 22.989.670,00		1 Laporan	Rp 350.000.000,00





		Pelabuhan Pengumpan Regional							
<b>2.15.03.1.09</b>	<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	<b>Jumlah persyaratan perizinan pembangunan dan operasional Pelabuhan Pengumpan Regional yang terpenuhi</b>		<b>5 Unit &amp; 1 Laporan</b>	<b>Rp 10.024.849.800,00</b>	<b>Rp 10.024.849.800,00</b>		<b>5 Unit &amp; 1 Laporan</b>	<b>Rp 2.150.000.000,00</b>
2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun		1 Unit	Rp 10.000.000.000,00	Rp 10.000.000.000,00		1 Unit	Rp -
2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian		1 Unit	Rp -	Rp -		1 Unit	Rp 1.050.000.000,00
2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara		1 Unit	Rp -	Rp -		1 Unit	Rp 500.000.000,00
2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		1 Laporan	Rp 24.849.800,00	Rp 24.849.800,00		1 Laporan	Rp 200.000.000,00
2.15.03.1.09.0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan		1 Unit				1 Unit	Rp 400.000.000,00





	pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia							
2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<b>Jumlah Fasilitas Pelayanan angkutan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang terpenuhi dan Jumlah laporan Persyaratan Perizinan operasional pelabuhan sungai danau dan penyeberangan yang terpenuhi</b>		2 Laporan, 1 Unit & 1 Orang	Rp 12.000.000.000,00	Rp 12.000.000.000,00		2 Laporan, 1 Unit & 1 Orang	Rp 1.830.000.000,00
2.15.03.1.10.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan		1 Laporan	Rp -	Rp -		1 Laporan	Rp 350.000.000,00





2.15.03.1.10.0006	Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi		1 Orang				1 Orang	Rp 80.000.000,00
2.15.03.1.10.0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		1 Laporan				1 Laporan	Rp 300.000.000,00
2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia		2 Unit	Rp 12.000.000.000,00	Rp 12.000.000.000,00		2 Unit	Rp 1.100.000.000,00
2.15.03.1.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan</b>	<b>Jumlah Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan</b>		<b>1 Laporan &amp; 1 Unit</b>	<b>Rp 43.982.500,00</b>	<b>Rp 43.982.500,00</b>		<b>1 Laporan &amp; 1 Unit</b>	<b>Rp 365.000.000,00</b>





	antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang terpenuhi							
2.15.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan		1 Unit	Rp 13.982.500,00	Rp 13.982.500,00		1 Unit	Rp 200.000.000,00
2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi		1 Laporan	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00		1 Laporan	Rp 165.000.000,00
2.15.03.1.02	<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi,</b>	<b>Jumlah persyaratan perolehan izin angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang terpenuhi</b>		1 Unit	<b>Rp 51.200.750,00</b>	<b>Rp 51.200.750,00</b>		1 Unit	<b>Rp 375.000.000,00</b>





	<b>Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional</b>							
2.15.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi		2 Laporan	Rp 51.200.750,00	Rp 51.200.750,00		2 Laporan Rp -
2.15.03.1.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan		1 Unit	Rp -	Rp -		1 Unit Rp 375.000.000,00
2.15.03.1.06	<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan</b>	<b>Jumlah laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan</b>		2 Laporan	Rp 214.737.350,00	Rp 214.737.350,00		2 Laporan Rp 350.000.000,00





	<b>Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</b>	<b>Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas yang tersusun</b>						
2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Rp 28.389.350,00	Rp 28.389.350,00		1 Dokumen	Rp 230.000.000,00





2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		2 Laporan	Rp 186.348.000,00	Rp 186.348.000,00		2 Laporan	Rp 120.000.000,00
2.15.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>1 Dokumen &amp; 1 Laporan</b>	<b>Rp 16.499.890,00</b>	<b>Rp 16.499.890,00</b>		<b>1 Dokumen &amp; 1 Laporan</b>	<b>Rp 400.000.000,00</b>
2.15.05.2.01	<b>Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian</b>	<b>Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian yang tersusun</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>Rp 200.000.000,00</b>
2.15.05.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian		<b>1 Dokumen</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>		<b>1 Dokumen</b>	Rp 200.000.000,00





2.15.05.1.02	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan, dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah yang tersusun		1 Laporan	Rp 16.499.890,00	Rp 16.499.890,00		1 Laporan	Rp 200.000.000,00
2.15.05.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah		1 Laporan	Rp 16.499.890,00	Rp 16.499.890,00		1 Laporan	Rp 200.000.000,00
UPT Pengelola Prasarana Perhubungan Kelas A									
	UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Kelas A								





01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	2 Dokumen, 3 Laporan, 5 Paket & 7 Unit	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00		2 Dokumen, 3 Laporan, 5 Paket & 7 Unit	Rp 80.000.000,00
01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	Rp -	Rp -		2 Dokumen	Rp 30.000.000,00
01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun		3 Laporan	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00		3 Laporan	Rp 50.000.000,00
01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Kota Palu	2 Dokumen & 12 Laporan	Rp -	Rp -		2 Dokumen & 12 Laporan	Rp 50.000.000,00
01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		2 Dokumen	Rp -	Rp -		2 Dokumen	Rp 25.000.000,00
01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		12 Laporan	Rp -	Rp -		12 Laporan	Rp 25.000.000,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Yang Tersedia dan Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan	Kota Palu	2 Orang	Rp -	Rp -		2 Orang	Rp 35.000.000,00





		<b>Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>						
01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang	Rp -	Rp -		2 Orang  Rp 35.000.000,00
<b>01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Tersusun</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>5 Paket</b>	<b>Rp 123.896.649,00</b>	<b>Rp 123.896.649,00</b>		<b>5 Paket  Rp 97.000.000,00</b>
01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	Rp 5.450.428,00	Rp 5.450.428,00		1 Paket  Rp 5.000.000,00
01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	Rp 99.130.364,00	Rp 99.130.364,00		1 Paket  Rp 70.000.000,00
01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	Rp 8.647.562,00	Rp 8.647.562,00		1 Paket  Rp 10.000.000,00





01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	Rp 10.668.295,00	Rp 10.668.295,00		2 Paket	Rp 12.000.000,00
<b>01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>4 Unit</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>		<b>4 Unit</b>	<b>Rp 60.000.000,00</b>
01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	Rp -	Rp -		1 Unit	Rp 30.000.000,00
01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 Unit	Rp -	Rp -		3 Unit	Rp 30.000.000,00
<b>01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>Rp 914.118.245,00</b>	<b>Rp 914.118.245,00</b>		<b>3 Laporan</b>	<b>Rp 723.000.000,00</b>
01.2.08,0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	Rp 1.654.000,00	Rp 1.654.000,00		1 Laporan	Rp 3.000.000,00
01.2.08,0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber		1 Laporan	Rp 133.361.745,00	Rp 133.361.745,00		1 Laporan	Rp 120.000.000,00





		Daya Air dan Listrik yang disediakan						
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	Rp 779.102.500,00	Rp 779.102.500,00		1 Laporan Rp 600.000.000,00
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>7 Unit</b>	<b>Rp 47.938.000,00</b>	<b>Rp 47.938.000,00</b>		<b>7 Unit Rp 55.000.000,00</b>
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 Unit	Rp 33.869.000,00	Rp 33.869.000,00		5 Unit Rp 35.000.000,00
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2 unit	Rp 14.069.000,00	Rp 14.069.000,00		2 unit Rp 20.000.000,00
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Konektivitas Darat, Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>2 Unit</b>	<b>Rp 60.000.000,00</b>	<b>Rp 60.000.000,00</b>		<b>2 Unit Rp 250.000.000,00</b>
<b>2.15.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>	<b>Jumlah Terminal Tipe B Yang Terpelihara</b>		<b>2 Unit</b>	<b>Rp 60.000.000,00</b>	<b>Rp 60.000.000,00</b>		<b>2 Unit Rp 250.000.000,00</b>





		dan Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersusun							
2.15.02.1.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi		2 Unit	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00		2 Unit	Rp 80.000.000,00
2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi		2 Orang	Rp -	Rp -		2 Orang	Rp 70.000.000,00
2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara		2 Unit	Rp -	Rp -		2 Unit	Rp 100.000.000,00
2.15.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Konektivitas Laut</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	5 Unit	Rp 131.478.765,00	Rp 131.478.765,00		5 Unit	Rp 328.262.765,00
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin	Jumlah persyaratan perizinan		3 Unit	Rp 18.216.000,00	Rp 18.216.000,00		3 Unit	Rp 215.000.000,00





	<b>Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	<b>pembangunan dan operasional Pelabuhan Pengumpan Regional yang terpenuhi</b>							
2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara		1 Unit	Rp -	Rp -		1 Unit	Rp 75.000.000,00
2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		1 Unit	Rp 18.216.000,00	Rp 18.216.000,00		1 Unit	Rp 60.000.000,00
2.15.03.1.09.0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia		1 Unit	Rp -	Rp -		1 Unit	Rp 80.000.000,00
2.15.03.1.10	<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Fasilitas Pelayanan angkutan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang terpenuhi dan Jumlah</b>		4 Unit	Rp 113.262.765,00	Rp 113.262.765,00		4 Unit	Rp 113.262.765,00





		<b>laporan Persyaratan Perizinan operasional pelabuhan sungai danau dan penyeberangan yang terpenuhi</b>							
2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan		1 Unit	Rp -	Rp -		1 Unit	Rp 100.000.000,00
2.15.03.1.10.0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		1 Unit	Rp 113.262.765,00	Rp 113.262.765,00		1 Unit	Rp 85.000.000,00





## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, serta merujuk kepada hasil evaluasi kinerja tahun 2025 sebagaimana dibahas sebelumnya, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah dengan mempertimbangkan aspek seperti kondisi, permasalahan, dan isu strategis.

- a. Secara garis besar Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 terdiri dari 4 program, 26 kegiatan, 56 Sub Kegiatan dengan total pendanaan sebesar Rp.56.545.361.862,84,- yang dibiayai melalui APBD Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat beberapa penyesuaian usulan program kegiatan serta pagu indikatifnya sebagaimana hasil formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang dilakukan melalui proses rapat kerja teknis.





Tabel IV.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

No	Rancangan Awal RKPD				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>6 Dokumen, 10 Laporan, 1 Data, 66 Unit, 7 Paket, 120 Orang/Bulan, &amp; 40 Orang</b>	<b>Rp 24.880.631.342,00</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5 Dokumen, 3 Laporan &amp; 1 Data</b>	<b>Rp 1.091.768.000,00</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 350.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2 Dokumen	Rp 500.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun	3 Laporan	Rp 90.000.000,00
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	Rp 151.768.000,00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun</b>	<b>1 Dokumen, 1 Laporan &amp; 120 Orang/Bulan</b>	<b>Rp 13.034.861.863,00</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/Bulan	Rp 12.700.511.863,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun	1 Dokumen	Rp 334.350.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp -
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>Rp 48.719.000,00</b>





			<b>Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun</b>		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 48.719.000,00
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Yang Tersedia dan Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	<b>1 Paket &amp; 40 Orang</b>	<b>Rp 248.618.481,00</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Yang Tersedia	1 Paket	Rp 104.060.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40 Orang	Rp 144.558.481,00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Tersusun</b>	<b>5 Paket &amp; 1 Laporan</b>	<b>Rp 1.023.148.371,00</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 15.341.727,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 410.735.388,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 40.668.595,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp 519.681.116,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 36.721.545,00
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan</b>	<b>12 Unit &amp; 1 Paket</b>	<b>Rp 7.425.806.730,00</b>





	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	Rp 97.680.000,00
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Rp 128.126.730,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Rp 7.000.000.000,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp -
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp 200.000.000,00
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>Rp 1.086.345.897,00</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 17.270.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	Rp 251.328.897,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 194.377.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 623.370.000,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara</b>	<b>54 Unit</b>	<b>Rp 921.363.000,00</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	Rp 494.527.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	1 Unit	Rp 176.836.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	2 Unit	Rp 250.000.000,00



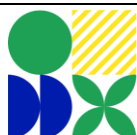


	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Rp -
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>Konektivitas Darat, Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal</b>	<b>5 Dokumen, 109 Laporan, 21.723 Unit &amp; 13 Orang</b>	<b>Rp 7.848.681.951,84</b>
	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>		<b>Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>Rp 92.200.000,00</b>
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	Rp -
	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi		Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	1 Dokumen	Rp 47.000.000,00
	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi		Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provins	1 Dokumen	Rp 45.200.000,00
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>		<b>Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi Yang Tersedia</b>	<b>21.645 Unit</b>	<b>Rp 6.491.631.404,00</b>
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	21467 Unit	Rp 6.241.631.404,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	178 Unit	Rp 250.000.000,00
	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>		<b>Jumlah Terminal Tipe B Yang Terpelihara dan Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersusun</b>	<b>8 Unit</b>	<b>Rp 18.950.000,00</b>
	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B		Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	2 Unit	Rp 18.950.000,00
	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)		Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2 Unit	





	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B		Jumlah Terminal yang Menyenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	2 Unit	
	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang		Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	0 Unit	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)		Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	
	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>		<b>Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi yang tersusun</b>	<b>62 Laporan</b>	<b>Rp 124.474.799,75</b>
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	60 Laporan	Rp 84.474.799,75
	Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi		Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	2 Laporan	Rp 40.000.000,00
	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>		<b>Jumlah Auditor Dan Inspektur Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang tersedia dan Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang tersusun</b>	<b>8 Laporan &amp; 13 Orang</b>	<b>Rp 857.868.448,09</b>
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	1 Laporan	Rp 282.868.448,09
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	Rp 500.640.000,00
	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ		Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	13 Orang	Rp 26.840.000,00
	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala		Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	6 Laporan	Rp 47.520.000,00





	Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				
	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Tersedia</b>	<b>25 Laporan &amp; 60 Unit</b>	<b>Rp 103.200.000,00</b>
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi		Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	25 Laporan	Rp 100.000.000,00
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	60 Unit	Rp 3.200.000,00
	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersusun</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>Rp 13.000.000,00</b>
	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Rp 13.000.000,00
	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang terpenuhi</b>	<b>10 Unit</b>	<b>Rp -</b>
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	10 Unit	Rp -





	<b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang tersusun</b>	<b>1 Dokumen &amp; 1 Laporan</b>	<b>Rp 66.816.550,00</b>
	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Rp 21.680.850,00
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Rp 45.135.700,00
	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b>		<b>Jumlah Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b>	<b>13 Laporan</b>	<b>Rp 80.540.750,00</b>
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	13 Laporan	Rp 80.540.750,00
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>Konektivitas Laut</b>	<b>3 Dokumen, 13 Laporan, 7 Unit &amp; 1 Orang</b>	<b>Rp 22.472.117.020,00</b>
	<b>Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan</b>		<b>Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi yang tersusun</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>Rp -</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	3 Laporan	Rp -
	<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan</b>		<b>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>Rp 55.572.000,00</b>





	<b>Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang tersusun</b>		
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Rp 55.572.000,00
	<b>Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tarif ASDP yang tersusun</b>	<b>2 Dokumen &amp; 0 Laporan</b>	<b>Rp 13.860.000,00</b>
	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp 13.860.000,00
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	Rp -
	<b>Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Rencana Induk Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah</b>	<b>1 Dokumen &amp; 1 Laporan</b>	<b>Rp 67.914.620,00</b>





<b>Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional</b>		<b>Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang tersusun</b>		
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	Rp 44.924.950,00
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Rp 22.989.670,00
<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</b>		<b>Jumlah persyaratan perizinan pembangunan dan operasional Pelabuhan Pengumpan Regional yang terpenuhi</b>	<b>5 Unit &amp; 1 Laporan</b>	<b>Rp 10.024.849.800,00</b>
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	Rp 10.000.000.000,00
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	1 Unit	Rp -
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1 Unit	Rp -
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Rp 24.849.800,00
Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	1 Unit	
<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Fasilitas Pelayanan angkutan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang terpenuhi dan</b>	<b>2 Laporan, 1 Unit &amp; 1 Orang</b>	<b>Rp 12.000.000.000,00</b>





			<b>Jumlah laporan Persyaratan Perizinan operasional pelabuhan sungai danau dan penyeberangan yang terpenuhi</b>		
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	1 Laporan	Rp -
	Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau		Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	1 Orang	
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	
	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	2 Unit	Rp 12.000.000.000,00
	<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang terpenuhi</b>	<b>1 Laporan &amp; 1 Unit</b>	<b>Rp 43.982.500,00</b>
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	1 Unit	Rp 13.982.500,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	1 Laporan	Rp 30.000.000,00





	Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi		Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi		
	<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional</b>		<b>Jumlah persyaratan perolehan izin angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang terpenuhi</b>	1 Unit	Rp 51.200.750,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	2 Laporan	Rp 51.200.750,00
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	1 Unit	Rp -
	<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</b>		<b>Jumlah laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas yang tersusun</b>	2 Laporan	Rp 214.737.350,00
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut		Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait	1 Dokumen	Rp 28.389.350,00





	atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2 Laporan	Rp 186.348.000,00
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Perlindungan Kereta Api</b>	<b>1 Dokumen &amp; 1 Laporan</b>	<b>Rp 16.499.890,00</b>
	<b>Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian</b>		<b>Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian yang tersusun</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>Rp -</b>
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian		Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	<b>1 Dokumen</b>	<b>Rp -</b>
	<b>Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan, dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah yang tersusun</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>Rp 16.499.890,00</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	1 Laporan	Rp 16.499.890,00





## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, merupakan penjabaran pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 dan 2025.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dengan kata lain, pengukuran kinerja didahului dengan tahapan penetapan indikator kinerja yang selanjutnya selalu dilakukan evaluasi terhadap hasil kinerja yang selama ini dilaksanakan.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja Renja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 15 September 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



**SUMARNO, S.E**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670527 199403 1 013



**RENCANA KERJA TAHUN 2026**  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH